



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PENJELASAN RANPERDA USUL PRAKARSA KOMISI E DPRD
PROVINSI JAWA TENGAH ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

Disampaikan oleh: H. ABDUL AZIZ, S.Ag, M.Si.

Yang Terhormat Sdr. Pj. Gubernur Jawa Tengah.

Yang saya hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang saya hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tamu Undangan, Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi untuk kita semua.

Pertama tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanan-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna Penjelasan Usul Prakarsa Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Pemaajuan Kebudayaan.

**Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan
yang saya hormati,**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengusung konsep pemajuan kebudayaan yang terdiri atas langkah perlindungan, pengembangan/pemanfaatan, dan pembinaan, yang diterapkan pada obyek pemajuan kebudayaan, serta dijalankan dalam ekosistem pemajuan kebudayaan.

Undang Undang ini juga memandang bahwa globalisasi bukan sebagai ancaman melainkan sebagai peluang bagi budaya Indonesia untuk dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan peradaban dunia

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Jawa Tengah memiliki Objek Pemajuan Kebudayaan mulai dari a) tradisi lisan; b) manuskrip; c) adat istiadat, d) ritus; e) pengetahuan tradisional; f) teknologi tradisional, g) seni, h) bahasa, i) permainan rakyat, dan j) olahraga tradisional yang perlu untuk dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan yang menjadi indikator kinerja dapat dilihat bahwa IPK Jawa Tengah selama empat tahun terakhir berada di atas angka IPK Nasional, namun demikian skor IPK Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dalam tiga tahun terakhir, terakhir 59,12 menurun menjadi 51,90. Penurunan

angka IPK Jawa Tengah terjadi karena penurunan pada 3 dimensi pembentuknya, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi ekspresi budaya dan dimensi gender

Kecenderungan penurunan dimensi ekonomi budaya mengindikasikan bahwa minat masyarakat yang menurun untuk menjadikan aktivitas seni budaya sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan ekonomi mereka. Hal tersebut bisa saja terjadi karena “pasar budaya lokal” di Jawa Tengah belum memberikan reward yang menjanjikan untuk para pelaku seni budaya lokal. Selain itu, pengukuran ekonomi kreatif/industri ekonomi kreatif juga belum terukur dalam dimensi ini.

Penurunan dimensi ekspresi budaya menunjukkan indikasi bahwa ada kecenderungan peralihan cara masyarakat untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yaitu melalui media digital. Sementara itu, pengukuran dimensi ekspresi budaya (indikator) masih terbatas pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat, kegiatan organisasi, penduduk yang terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni, dan rumah tangga yang menyelenggarakan/menghadiri acara adat. Pada dimensi ekspresi budaya, penurunan angka didorong oleh menurunnya indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dan persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.

Hal yang sama juga berlaku bagi dimensi gender. Menurunnya angka dimensi gender didorong oleh penurunan indikator rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki pada dua tahun terakhir.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Pemajuan Kebudayaan bertujuan:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka Pentingnya Pemajuan Kebudayaan di Jawa Tengah didasarkan pada pertimbangan bahwa

- a. bahwa kebudayaan daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa yang diakui, dihormati, serta dijunjung tinggi;

- b. bahwa untuk memajukan kebudayaan daerah perlu pengaturan mengenai Pemajuan, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan;
- c. bahwa sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang pemajuan kebudayaan akan mengatur tentang:

- a. objek pemajuan kebudayaan;
- b. pemajuan kebudayaan;
- c. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- d. sistem pengelolaan kebudayaan terpadu;
- e. ekosistem kebudayaan;
- f. apresiasi budaya;
- g. penghargaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan

**Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan
yang sayahormati,**

Demikian saya sampaikan, penjelasan terkait inisiatif DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang harapannya kedepan dapat segera terlaksana dengan baik dalam kerangka peningkatan kualitas tenaga kerja, hingga kesejahteraan tenaga kerja.

Semarang, 28 November 2023

KOMISI E
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

ttd

ABDUL HAMID, S. Pd.I, M.Pd